



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022

INTEGRITAS, INDEPENDEN, PROFESIONAL

JLN. DHARMA PRAJA NO.04 KELURAHAN GUNUNG TINGGI
KECAMATAN BATULICINKABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN - KODE POS 72171

 Inspektoratdaerah_tanahbumbu

 Inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

 Inspekda.tanahbumbukab.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Insptansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA Tahun ke 5 (lima) Tahun 2021-2026 dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tujuan yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcame*. LKjIP Tahun 2022 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di waktu yang akan datang.

Batulicin, Januari 2023



Inspektur

Yulian Herawati, SE.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790727 200604 2 042

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tugas dan fungsinya telah berupaya secara optimal mewujudkan sasaran strategis. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 1:

- Predikat SAKIP

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kinerja Pengawas Internal

Indikator Kinerja 2:

- Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas
- Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A
- Capaian Kapabilitas APIP

Adapun capaian indikator kinerja tahun 2022 yaitu Predikat SAKIP dengan target A dan realisasi A atau 100%. Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas dengan target 7,14% dan teralisasi 0%. Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A dengan target 19,05% dan teralisasi 22,5% atau terealisasi 100% dari yang ditargetkan sedangkan Capaian Kapabilitas APIP dengan target Level 2 dan teralisasi Level 2 atau 100%.

Sasaran strategis dan indikator kinerja dicapai melalui program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran Rp. 13.655.490.0000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.400.306.274,00 atau 90,81%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....I

RINGKASAN EKSEKUTIFII

DAFTAR ISIIII

DAFTAR TABEL..... IV

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. LATAR BELAKANG1

 B. LANDASAN HUKUM2

 C. MAKSUD DAN TUJUAN.....4

 D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....4

 E. STRUKTUR ORGANISASI6

 F. SUMBER DAYA MANUSIA6

 G. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS7

BAB II PERENCANAAN KINERJA9

 A. RENCANA STRATEGIS9

 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....10

 C. PERJANJIAN KINERJA (PK)11

 D. PENETAPAN KINERJA11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....13

 A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH13

 C. REALISASI ANGGARAN33

BAB IV PENUTUP36

 A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
 TANAH BUMBU36

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG36

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1.1 : Data Pegawai PNS/Fungsional dan Non PNS/PTT/Kontrak tahun 2022	7
Tabel 2.1 : Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2021-2026	9
Tabel 2.2 : Strategi dan Kebijakan.....	10
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022	11
Tabel 2.4 : Penetapan Kinerja Tahun 2021-2026.....	12
Tabel 3.1 : Kategori Prosentase Pencapaian Sasaran	14
Tabel 3.2 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 1.....	15
Tabel 3.3 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	15
Tabel 3.4 : Realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah	16
Tabel 3.5 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan standar Nasional.....	16
Tabel 3.6 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Sasaran 1 (satu).....	18
Tabel 3.7 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir.....	19
Tabel 3.8 : Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah	19
Tabel 3.9 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan standar Nasional.....	20
Tabel 3.10 : Nilai SAKIP SKPD se- Kabupaten Tanah Bumbu	22
Tabel 3.11 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Sasaran 2 (dua)	25
Tabel 3.12 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
Tabel 3.13 : Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah	26
Tabel 3.14 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional	26
Tabel 3.15 : Elemen level penilaian BPKP.....	28
Tabel 3.16 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Sasaran 3 (tiga)	29
Tabel 3.17 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	29
Tabel 3.18 : Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah.....	20
Tabel 3.19 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional	20
Tabel 3.20 : Program dan Kegiatan, Pagu Anggaran serta Realisasi.....	33
Tabel 3.21 : Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2022 dan Perbandingan 2021	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean govenmant*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, guna mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran. Sedangkan aturan lain yang mengamanatkan LKjIP yaitu Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman, Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini telah tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022.

Dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan. Demikian pula kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar mendapat perhatian khusus mengingat besarnya tanggungjawab yang dibebankan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Lembaga APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 disusun memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menpan Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 67);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub.Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Inspektur Pembantu Wilayah I
5. Inspektur Pembantu Wilayah II
6. Inspektur Pembantu Wilayah III

7. Inspektur Pembantu Wilayah IV

8. Inspektur Pembantu Khusus

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas menyusun perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Empat orang Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah dan satu orang Inspektur Pembantu Khusus (Irsus) adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan SKPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu (Irban) wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus (Irsus) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Adapun kelompok fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan fungsional Auditor.

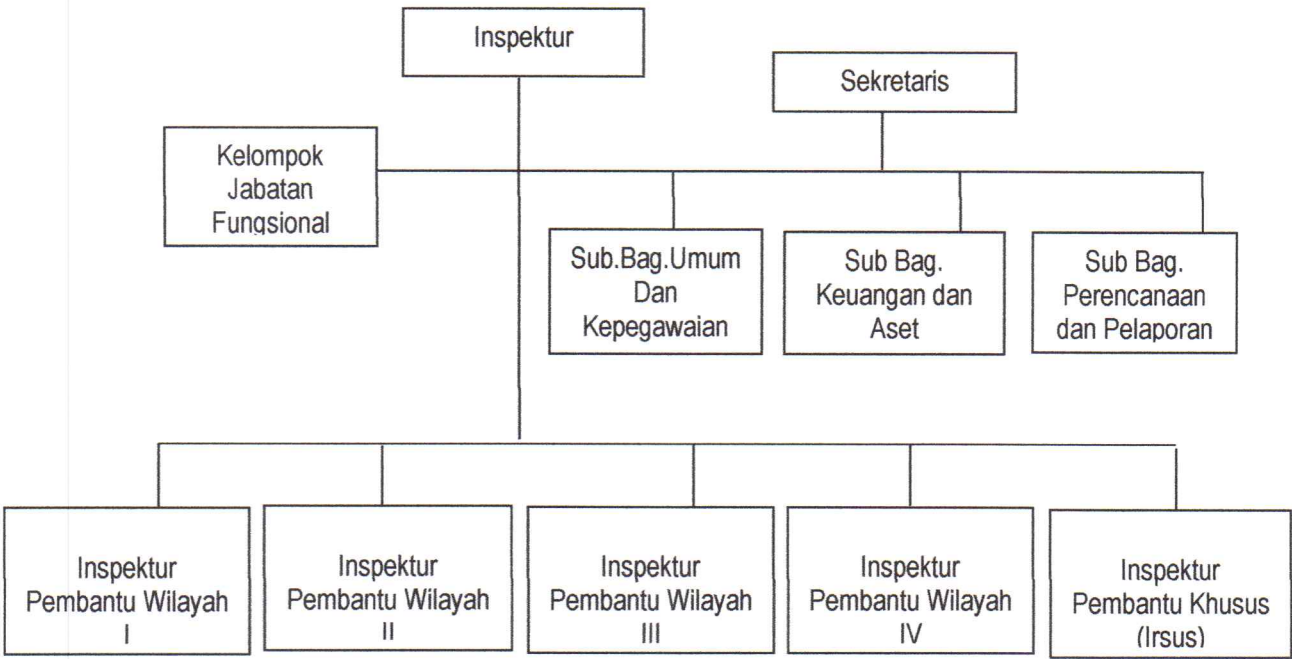
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- h. Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

E. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya capaian kinerja yang ingin dicapai. Bukan hanya dari segi jumlah tapi kualitas sumber daya manusia juga harus sesuai

dengan kebutuhan yang ada. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2022 yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai Non PNS/PTT/Kontrak dapat dilihat seperti table berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai PNS/Fungsional/Non PNS/PTT/Kontrak
Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai PNS	49 orang
- Kualifikasi pendidikan	
a. S2	a.14 orang
b. S1	b.33 orang
c. D III	c. 1 orang
d. SLTA	d. 1 orang
- Pangkat Golongan	
a. Gol. IV	a.13 orang
b. Gol. III	b.35 orang
c. Gol. II	c. 1 orang
- Pejabat	
a. Struktural	a. 9 orang
b. Fungsional	b.34 orang
c. Staf PNS	c. 9 orang
d. PTT	d.17 orang

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai Non PNS	21
- Kualifikasi Pendidikan PTT/Kontrak	
a. S2	a. 0 orang
b. S1	b. 5 orang
c. D III	c. 0 orang
d. SLTA	d.13 orang
e. SLTP	e. 1 orang
f. SD	f. 2 orang

G. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun external.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Banyaknya mandatori pemerintah pusat yang tidak disertai dengan pedoman pelaksanaan;
2. Kurangnya SDM yang kompeten;
3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan TLHP APIP (yang belum selesai);
4. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai;
5. Biaya pengawasan masih kecil tidak sebanding dengan resiko dan beban kerja APIP;
6. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
7. Belum adanya aplikasi WBS.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa akan datang. Adapun Isu-Isu Strategis yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

1. Lemahnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen rencana strategis (RENSTRA) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan, karena itu perlu disusun kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja dalam satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya (*output, outcome*) serta target yang ingin dicapai (*Quantitative objective*). Perencanaan kinerja yang baik harus mempertimbangkan pelaksanaan/pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi dan proyeksi kedepan.

Adapun visi dan misi, tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

VISI	MISI KE-5	TUJUAN	SASARAN
Membangun Tanah Bumbu maju,unggul, mandiri,religius dan demokratis	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Strategi dan kebijakan yang akan diambil sesuai dengan Renstra oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Startegi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penerapan pelaksanaan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah	1. Menumbuhkan pemahaman SPIP pada setiap aparatur di masing–masing Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penigkatan,pembinaan dan pengawasan Internal
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah,baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan pembangunan daerah

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tercapainya strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - Kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah;
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan Penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawas internal
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
- 3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - Kegiatan Pendampingan dan asistensi

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Didalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target dapat dilihat pada tabel RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebagaimana terlampir.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tanah Bumbu dan Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dokumen perencanaan target kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2022. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat Penetapan Kinerja melalui Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2022 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab.Tanah Bumbu
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A
2.	Meningkatnya kinerja pengawas internal	Persentase SKPD yang menerima zona integritas	7,14%
		Persentase SKPD dengan nilai Sakip minimal A	19,05%
		Capaian kapabilitas APIP	Level 2

D. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab/kinerja dengan yang memberikan tanggungjawab/kinerja. Penetapan Kinerja menggambarkan capaian kinerja

yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tujuan Penetapan Kinerja yaitu :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah
- 3. Sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 4. Menciptakan tolak ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi

Adapun penetapan kinerja Inspektorat Dearah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Kinerja		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja						Kondisi Atasakhir renstra
		Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Capaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A	A
				Meningkatnya kinerja pengawas internal	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	7,14%	7,14%	7,14%	9,52%	9,52%	11,90%	11,90%
					Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	16,67%	19,05%	21,43%	23,81%	26,19%	28,57%	28,57%
					Capaian kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, namun esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang telah dicapai kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, hal ini adalah bukti dukungan pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (Performance Gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Prosentase Pencapaian Sasaran

Peringkat	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
II	81 % s.d 90 %	Baik (berhasil)
III	61 s.d 80 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

Dari hasil penilaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mencapai tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori capaian “Cukup Berhasil” berdasarkan rentang capaian yaitu sebesar 79,25%. Hasil pengukuran indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022, realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
-----------	---

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran predikat SAKIP. Metodologi yang digunakan pada evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan instansi dengan menggunakan teknik *criteria referrenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen yang dinilai adalah aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 1 (satu).

Untuk capaian kinerja pada sasaran 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Predikat SAKIP, capaian Indikator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2022 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Predikat SAKIP	Angka tertimbang	A	A	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini untuk realisasi pada tahun 2022 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) yaitu sasarannya meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran predikat SAKIP pada Tahun anggaran 2022. Kategori Prosentase pencapaian indikator sasaran pada IKU 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan Indikator sasaran yaitu predikat SAKIP yang mendapatkan nilai SAKIP A ini rentang capaian 100% atau kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	-	-	-	-

Realisasi untuk Indikator Sasaran Kinerja tahun 2021 Predikat SAKIP dengan realisasi A, sedangkan realisasi pada tahun 2022 Predikat

SAKIP A. dimana pada tahun 2022 persentase nilai SAKIP mengalami kenaikan yakni 86,95%.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.4
Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
Meningkatnya Akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	-

Realisasi Kinerja tahun anggaran 2022 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan Indikator sasaran predikat SAKIP Tahun anggaran 2022 realisasinya telah sesuai dengan target perencanaan awal Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.5
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2022 dengan standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Standar Nasional	Selisih	Ket
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Persentase SAKIP	A	A	-	-

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan Indikator sasaran predikat SAKIP sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan standar nasional sudah sesuai. Dimana untuk Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan nilai SAKIP A.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- **Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:**
 1. Adanya komitmen pimpinan untuk mempekuat kinerja;
 2. Adanya Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap hasil yang telah diberikan akan terus memperbaiki atas kekurangan setiap tahunnya.
- **Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:**
 1. Banyaknya dokumen yang harus disiapkan pada waktu yang telah ditentukan;
 2. Kurangnya sosialisasi terkait masalah indikator kinerja.
- **Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana rencana kinerja anantara lain adalah:**
 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi atas dokumen penunjang dalam evaluasi SAKIP.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran predikat SAKIP ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan baik dalam bentuk informasi langsung saat rapat-rapat maupun saat pelaksanaan penilaian/evaluasi.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran Predikat SAKIP adalah:

Program:

Program Penyelenggaraan pengawasan

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal

Sub Kegiatan:

Sub Kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah

Sasaran 2	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal
------------------	---

Sasaran 2 (dua) ini yakni meningkatnya kinerja pengawasan internal, dimana terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Adapun indikator sasaran 1 (satu) adalah presentase SKPD yang menerima Zona Integritas (ZI).

Amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menargetkan SKPD yang menerima Zona Integritas sebesar 7,14%, namun hasil penilaian tahun 2022 adalah 0% atau tidak terealisasi. Kegagalan atas capaian indikator sasaran ini karena adanya indikator penilaian yang tidak terpenuhi yang sudah diatur pada penilaian Zona Integritas (ZI) yaitu Level Kapabilitas APIP Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada Level 2, sedangkan pemenuhan indikator yang boleh masuk dalam penilaian Zona Integritas (ZI) Level kapabilitas APIP harus berada pada Level 3. Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 1 (satu) yaitu persentase SKPD yang menerima Zona Integritas dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2 dengan Indikator Sasaran 1 (satu)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	%	7,14%	0%	0%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					0%

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	19,64%	0%	-	-	-	-

Pada Tahun 2021 realisasi indikator sasaran SKPD yang menerima zona integritas adalah 19,64% atau 100% dari yang ditargetkan. Sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 0% karena Kabupaten Tanah Bumbu tidak masuk dalam penilaian zona integritas.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.8
Realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	19,64%	8,93%	-

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) dengan indikator sasaran 1 (satu) yakni persentase SKPD yang menerima zona integritas tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi relisasinya 19,64% hal ini menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah berkinerja dengan baik. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2 (dua) ini adalah salah satunya telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD yang diusulkan masuk dalam zona integritas terutama melakukan pendampingan dan pemantauan pada saat infut dokumen.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.9
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	0%	-		

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yakni persentase SKPD yang menerima zona integritas dimana Kabupaten Tanah Bumbu tidak masuk dalam kategori penilaian karena Level Kapabilitas APIP masih rendah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan peningkatan Level Kapabilitas APIP dari Level 2 menuju pada Level 3;
2. Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penggerak OPD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) guna peningkatan ke Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Adanya komitmen SKPD untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen pendukung laporan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

- Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

1. Belum dilakukan penilaian oleh BPKP;
2. Sosialisasi terhadap kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas masih kurang;
3. Masih adanya perangkat daerah yang belum menyiapkan dokumen lengkap dan terinci yang di *input* pada waktu yang telah ditentukan.

- **Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain adalah:**

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pengiriman surat permohonan evaluasi hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Nomor: B/700/2495/ID-Sekre.1/XI/2022 tanggal 18 November 2022 ke BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, namun sampai dengan saat ini penilaian masih dalam proses *quality assurance* dari BPKP;
2. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap OPD yang diusulkan untuk masuk dalam Zona Integritas;
3. Akan melakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi ke seluruh OPD

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 1 (satu) yakni persentase SKPD yang menerima Zona Integritas ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan baik dalam bentuk informasi langsung saat rapat koordinasi maupun saat pelaksanaan evaluasi. Selain itu alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi pencapaian sasaran indikator ini.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) meningkatnya kinerja pengawas internal dengan indikator sasaran 1 (satu) yakni persentase SKPD yang menerima zona integritas ini adalah:

Program:

Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Kegiatan:

Kegiatan Pendampingan dan asistensi

Sub Kegiatan:

Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 2 (dua) yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A.

Metodologi yang digunakan pada evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan dengan menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen yang dinilai adalah aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 41 SKPD terdiri dari 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah, 19 Dinas, 5 Badan, 1 Inspektorat Daerah, 1 RSUD, 1 Kantor dan 12 Kecamatan. Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 41 SKPD secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Berkatagori A (Memuaskan), berjumlah 9 SKPD
- b. Berkatagori BB (Sangat Baik), berjumlah 30 SKPD
- c. Berkatagori B (Baik), berjumlah 2 SKPD

Rekapitulasi rincian nilai implementasi SAKIP yang diperoleh pada masing-masing SKPD sesuai dengan urutan nilai tertinggi ke rendah terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Nilai SAKIP SKPD se- Kabupaten Tanah Bumbu

No	SKPD	Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%)	Nilai	Kategori
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28,50	25,50	13,50	21,25	88,75	A
2	Inspektorat Daerah	27,00	25,50	13,20	21,25	86,95	A
3	Sekretariat Daerah	27,60	25,80	12,75	19,50	85,65	A
4	Kecamatan Karang Bintang	28,50	26,70	13,20	15,75	84,15	A
5	Dinas Kesehatan	28,50	23,70	13,05	17,75	83,00	A

No	SKPD	Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%)	Nilai	Kategori
6	Dinas Perikanan	27,00	24,00	12,30	18,00	81,30	A
7	Badan Kepegawaian Daerah	25,50	23,40	12,75	19,25	80,90	A
8	Sekretariat DPRD	27,60	22,50	12,00	18,25	80,35	A
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27,00	23,40	10,35	19,25	80,00	A
10	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	24,60	24,60	12,00	18,75	79,95	BB
11	Dinas Perhubungan	24,60	25,50	11,85	18,00	79,95	BB
12	RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	24,60	24,60	12,00	18,75	79,95	BB
13	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25,50	23,10	10,80	20,50	79,90	BB
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26,10	22,20	12,30	19,25	79,85	BB
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,00	21,00	11,55	20,25	79,80	BB
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	27,00	24,00	11,25	17,50	79,75	BB
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	27,00	23,40	11,70	17,50	79,60	BB
18	Dinas Lingkungan Hidup	24,60	24,60	12,90	17,50	79,60	BB
19	Dinas Sosial	24,60	24,60	11,55	18,75	79,50	BB
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24,60	24,60	11,55	18,75	79,50	BB
21	Badan Pendapatan Daerah / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	26,10	23,40	12,45	17,50	79,45	BB
22	Kecamatan Batulicin	23,10	23,70	11,25	21,25	79,30	BB
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,00	24,00	12,00	19,25	79,25	BB
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27,00	22,80	11,25	18,00	79,05	BB
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	26,10	23,10	12,30	17,50	79,00	BB

No	SKPD	Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%)	Nilai	Kategori
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26,10	23,10	13,05	16,50	78,75	BB
27	Dinas Pertanian	24,00	24,00	12,00	18,00	78,00	BB
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24,00	24,00	10,50	19,25	77,75	BB
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,70	24,00	12,15	17,50	77,35	BB
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24,00	22,50	11,55	18,75	76,80	BB
31	Kecamatan Sungai Loban	25,50	22,20	10,80	18,00	76,50	BB
32	Kecamatan Mantewe	23,10	21,30	12,00	19,75	76,15	BB
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24,60	23,40	10,50	17,50	76,00	BB
34	Kecamatan Kuranji	25,20	21,90	11,25	17,50	75,85	BB
35	Kecamatan Kusan Hilir	26,40	21,00	10,50	16,25	74,15	BB
36	Kecamatan Satui	26,10	21,60	10,35	15,75	73,80	BB
37	Kecamatan Kusan Hulu	23,10	21,00	10,50	17,50	72,10	BB
38	Kecamatan Simpang Empat	22,20	21,00	11,25	17,50	71,95	BB
39	Kecamatan Angsana	23,10	21,90	10,50	16,25	71,75	BB
40	Kecamatan Teluk Kepayang	20,40	20,40	11,25	17,50	69,55	B
41	Kecamatan Kusan Tengah	21,00	19,50	10,50	16,50	67,50	B

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) indikator sasaran 2 (dua).

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A, capaian Indikator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2022 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2
Indikator sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Peresntase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	%	19,05%	21,95%	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dimana pada tahu 2022 persentase SKPD dengan nilai SAKIP nilai A direncanakan 19,05% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 21,95% atau capaian 100% dari yang ditargetkan. Kategori Prosentase pencapaian indikator sasaran pada IKU 2 (dua) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A ini rentang capaian 100% atau kategori capaian “Sangat Berhasil”. Untuk tahun 2023 belum dilaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2022

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	16,67 %	21,95%	-	-	-	-

Untuk realisasi kinerja pada Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,95% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,67%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan SKPD yang mencapai nilai SAKIP A sebanyak 9 SKPD.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.13
Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	21,95%	19,05%	Persentase capaian sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih 2,9%

Realisasi Kinerja tahun anggaran 2022 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) sasaran meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran 2 (dua) yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A Tahun anggaran 2022 realisasinya tidak sesuai dengan target yang direncanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dimana persentase capaian sampai dengan tahun anggaran 2022 realisasi yakni 21,95% sedangkan target pada renstra tahun 2022 sebesar 19,05% ada selisih sebesar 2,9% dari target perencanaan.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.14
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2022 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Standar Nasional	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	21,95%	-	

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) sasaran meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran 2 (dua) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan standar nasional sudah memenuhi target dimana hasil penilaian SAKIP SKPD dari 41 SKPD tidak ada lagi kategori C .

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- **Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:**
 1. Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat peningkatan Kinerja SKPD;
 2. Adanya komitmen SKPD untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Laporan SAKIP SKPD beserta data pendukungnya;
- **Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:**
 1. Masih adanya SKPD yang belum menyiapkan dokumen pada waktu yang telah ditentukan;
 2. Data pendukung dokumen masih kurang;
- **Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana rencana kinerja anantara lain adalah:**
 1. Melakukan koordinasi dengan SKPD atas dokumen penunjang dalam evaluasi SAKIP SKPD;
 2. Memberikan masukan terhadap kekurangan dokumen SAKIP.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A, ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan baik dalam bentuk informasi langsung saat rapat-rapat terhadap SKPD maupun saat pelaksanaan penilaian/evaluasi.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A ini adalah:

Program:

Program Penyelenggaraan pengawasan

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal

Sub Kegiatan:

Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran Ke 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Untuk mencapai Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) ada 6 (enam) elemen yang di nilai yaitu:

1. Peran Dan Layanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi;
6. Struktur Tata Kelola.

Hasil penjaminan kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: SP-1644/D3/04/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 dimana Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyimpulkan bahwa hasil penilaian nilai kapabilitas APIP Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada "**Level 2**" dengan perincian level elemen sebagai berikut:

Tabel 3.15
Elemen Level penilaian BPKP

No	Elemen	Level Saat ini
1.	Peran dan Layanan	2
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3.	Praktik Profesional	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) Indikator sasaran 3 (tiga)

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) pada Indikator Sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) untuk tahun 2022 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Sasaran 3 (tiga)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Capaian Kapabilitas APIP	Level	2	2	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Realisasi pada tahun anggaran 2022 pada IKU 2 (dua) yaitu yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP pada Indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2022 yakni 100%. Pada Tahun 2022 belum dilaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Kategori Prosentase pencapaian sasaran pada IKU 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP pada Indikator sasaran yaitu Capaian Kapabilitas APIP rentang capaian 100% atau kategori capaian ” **Sangat Berhasil**”.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.17
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Capaian Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	-	-	-	-

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP untuk target tahun anggaran 2022 yakni Level 2.

Adapun realisasi pada tahun anggaran 2022 yaitu berada pada Level 2 atau 100%.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.18
Realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Capaian Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	-

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian kapabilitas APIP di tahun anggaran 2022 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi relisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yakni berada di Level 2.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP ini dengan cara Meningkatkan Peran dan Layanan, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Praktek Profesional.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.19
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Capaian Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	1 Level	-

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP Tahun anggaran 2022 untuk penilaian level

pada Kabupaten untuk standar nasional belum memenuhi persyaratan, dimana untuk kategori Kabupaten Kapabilitas APIP harus berada pada Level 3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Belum meningkatnya Level Kapabilitas APIP Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi manajemen dan organisasi dalam bidang tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian (GRC). Hal ini dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum melakukan audit kinerja/penilaian atas aspek efisiensi, efektivitas dan kehematan serta layanan konsultasi yang dilakukan belum terdokumentasi dengan baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki kebijakan terkait strategi pemenuhan SDM dalam melaksanakan pengawasan;
3. Perencanaan pengembangan kompetensi SDM teknis substantif belum didasarkan pada gap kompetensi untuk standar kompetensi seperti audit kinerja.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR) dan audit kinerja;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum melampirkan kebijakan pemberlakuan kode etik, standar audit, mekanisme komunikasi internal, dan tata laksana tim;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum melampirkan realisasi atas pemberian penghargaan SDM terbaik dan Tim terbaik;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum menyusun perencanaan pengawasan dengan mempertimbangkan risiko tertinggi auditan. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum mampu mengurangi paparan risiko organisasi dan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dalam penerapan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian;
8. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum melaksanakan program penjaminan kualitas (QAIP) melalui reviu antar Irban dan Telaah Sejawat.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain dengan cara:

1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses Informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP;
3. Melaksanakan Program penjamin kualitas (QAIP) melalui kegiatan reviu antar Irban dan Telaahan Sejawat serta menindaklanjutinya;
4. Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP pada tahun anggaran 2022 adalah:

Program:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

Kegiatan:

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada Tahun Anggaran 2022 untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai belanja seluruhnya sebesar **Rp.13.655.490.000,00** (*tiga belas milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Adapun realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 yaitu **Rp. 12.400.306.274,00** (*dua belas milyar empat ratus juta tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*). Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 4 Program dan 9 Kegiatan. Adapun perincian nama program dan kegiatan serta pendanaan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Program dan Kegiatan, Pagu Anggaran serta Realisasi Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
<i>Administrasi Keuangan Daerah</i>		
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.405.067.800,00	7.341.437.578,00
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	691.952.300,00	689.501.700,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.200.000,00	96.768.000,00
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.934.000,00	3.934.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	315.509.000,00	154.383.429,00
<i>Admnistrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9.815.000,00	9.815.000,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.255.000,00	130.685.000,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.860.000,00	30.360.000,00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	2.160.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.315.827.000,00	1.312.337.345,00
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.206.420.000,00	683.620.000,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	161.345.000,00	125.334.665,00
- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	98.145.000,00	98.145.000,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.315.400,00	120.878.000,00
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	151.115.000,00	142.543.400,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	152.638.000,00	152.638.000,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan		
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>		
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	163.212.400,00	113.745.000,00
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	133.669.200,00	119.480.000,00
- Reviu Laporan Kinerja	263.719.000,00	236.535.000,00
- Reviu Laporan Keuangan	33.602.000,00	24.723.831,00
- Pengawasan Desa	251.904.100,00	159.204.100,00
- Kerjasama pengawasan internal	29.400.000,00	2.850.000,00
- Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.473.000,00	112.887.000,00
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>		
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	23.160.000,00	20.760.000,00
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	367.427.700,00	329.412.855,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>		
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.884.000,00	184.000,00
Program Perumusan Kebijakan,		

Pendampingan, dan Asistensi		
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>		
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	78.509.000,00	37.053.000,00
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.007.100,00	82.593.771,00
- Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	58.709.000,00	52.441.600,00
- Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	17.625.000,00	8.745.000,00
	13.655.490.000,00	12.400.306.274,00

Adapun pembagian jenis belanja anggaran tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 dan Perbandingan Realisasi 2021

Jenis Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase (%)	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	7.522.175.800,00	7.459.407.524,00	99,17%	6.693.165.476,00
Belanja Barang Jasa	4.926.214.200,00	4.256.598.750,00	86,41%	3.775.995.454,00
Belanja Modal	1.207.100.000,00	684.300.000,00	56,69%	602.020.171,00
Jumlah	13.655.490.000,00	12.400.306.274,00	90,81%	11.697.065.101,00

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis memperoleh tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori capaian "Cukup Berhasil" atau rentang capaian yaitu 79,25%. Dari Empat indikator sasaran pencapaiannya sebanyak Tiga indikator dalam kategori Sangat Berhasil dan Satu indikator dalam kategori "Kurang Berhasil". Adapun capaian masing-masing Indikator Sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran I (satu) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
 - Indikator Sasaran I Predikat SAKIP dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".
2. Sasaran II (dua) Meningkatnya Kinerja Pengawas Internal
 - Indikator Sasaran I Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas (ZI) dengan rentang capaian 0% atau kategori capaian "Kurang Berhasil".
 - Indikator Sasaran II Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".
 - Indikator Sasaran III Capaian Kapabilitas APIP dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dipergunakan dalam meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang, yakni :
Terkait dengan Indikator Sasaran Predikat SAKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIP;
- Mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal

penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku dan dilakukan pendampingan;

- Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.

Terkait dengan Indikator sasaran Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- Melakukan peningkatan Level Kapabilitas APIP dari Level 2 menjadi Level 3 melalui hasil penilaian BPKP;
- Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk menuju Zona Integritas (ZI).

Terkait dengan Indikator sasaran Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- Melakukan penilaian dan pembinaan kepada SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya;
- Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Auditor dan P2UPD yang masuk sebagai tim evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi.

Terkait dengan Indikator sasaran Capaian Kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- Membuat perencanaan PKPT berbasis risiko dan melakukan pemetaan audit berbasis risiko;
- Mengikutsertakan APIP dalam Diklat dan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Minimal 120 Jam per orang setiap tahun anggaran;
- Meningkatkan koordinasi BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Daerah Provinsi dan Kementrian/Lembaga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, semoga dapat digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja yang akan datang.

Batulicin, Januari 2023

Inspektur,



Yulian Herawati, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790727 200604 2 042